

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia mencapai 271 juta jiwa, dan menduduki peringkat keempat di dunia (worldometers, 2019). Hal ini menimbulkan tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Tantangan tersebut yaitu kemiskinan. Berbicara mengenai kemiskinan, Negara anggota PBB telah mengusung rangkaian pembangunan berkelanjutan 2030 dan menyertakan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Salah satu poin yang menjadi sorotan utama yaitu pada poin pertama mengenai pengentasan kemiskinan. Seluruh Negara anggota bagian PBB terus berupaya menangani hal tersebut, seperti di negara Uni Eropa dengan cara membuka lapangan pekerjaan dengan menginvestasikan dana dalam jumlah yang sangat besar (Penelitian Anghelache, 2017). Indonesia yang termasuk dalam perserikatan ini juga harus berupaya keras untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya adalah mengurangi angka pengangguran.

Asian Development Bank (2019) menyebutkan bahwa garis kemiskinan Indonesia berada dalam angka 9.8 % yang mana masih bisa dikatakan cukup tinggi. Perlu diketahui bahwa kemiskinan di negara ini sebagian besar disebabkan karena pengangguran. Pengangguran terjadi karena jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penduduk dengan usia produktif yang sangat besar, ditambah lagi dengan adanya teknologi yang mengambil alih fungsi dan peran serta tenaga kerja manusia dalam suatu pekerjaan. Hal tersebut dibuktikan dalam penelitian Chaves (2016) yang mengatakan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia hampir sepertiga berasal dari ketimpangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan terdapat

masyarakat yang bekerja tetapi tidak mendapatkan kesejahteraan dan pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam data BPS (2019) Pada kategori tingkat pendidikan, pengangguran terbuka(tidak termasuk setengah menganggur) yang terjadi di Indonesia baik di desa maupun kota pada penduduk laki-laki mencapai angka 4 juta jiwa sedangkan untuk perempuan mencapai angka 2,5 juta jiwa. Namun jika ditinjau pada kategori umur, Pengangguran terbuka (tidak termasuk setengah menganggur) yang ada di desa dan kota mencapai 6,8 juta jiwa. Berikut data nya :

Tabel 1.1

Pengangguran ditinjau dari tingkat pendidikan tertinggi pada jenis penduduk laki-laki.

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Pengangguran Terbuka, dan Kategori Pekerja tidak Penuh. <i>Population Is Years 15 of Age and Overby Educational Attainment. Unemployment, and Category Less than Normal Working Hourse.</i> (Februari/February 2019)					
Perkotaan+Pedesaan/Urban+Rural				Laki-laki/Male	
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan <i>Educational Attainment</i>	Pengangguran Terbuka <i>Unemployment</i>	Pekerja Tidak Penuh/ <i>Less than Normal Working Hourse</i>			Setengah Penganggur <i>Unemployment + Underemployment</i>
		Setengah Penganggur <i>Underemploye nt</i>	Paruh Waktu <i>Part-time Worker</i>	Jumlah Total	
0	23.654	107.306	577.554	684.860	130.960
1	300.402	821.941	2.227.997	3.049.938	1.122.343
2	652.172	1.620.244	3.504.353	2.124.597	2.272.416
3	861.760	1.212.884	2.455.817	3.668.701	2.074.644
4	958.634	1.051.666	177.951	2.829.617	2.010.300
5	953.713	621.100	882.215	1.50	1.574.813

				3.31 5	
6	109.745	76.901	201.415	278. 316	186.646
7	399.586	367.785	935.310	1.30 3.09 5	767.372
Jumlah/Total	4.259.666	5.879.827	12.562. 612	10.4 42.4 38	10.139.493
Catatan / Note :					
0	Tidak/Belum Pernah Sekolah/ <i>No Schooling</i>				
1	Tidak/Belum Tamat SD/ <i>Not Yet completed Primary School</i>				
2	Sekolah Dasar / <i>Primary School</i>				
3	Sekolah Menengah Pertama / <i>Junior High School</i>				
4	SMA (umum) / <i>Senior High School (General)</i>				
5	SMA (Kejuruan) / <i>Senior High School (Vocation)</i>				
6	Diploma 1/II/III/Akademi / <i>Diploma/ 1/II/III/Academy</i>				
7	Universitas / <i>University</i>				

Sumber : BPS Februari 2019

Tabel 1.2

Pengangguran ditinjau dari tingkat pendidikan tertinggi pada jenis penduduk perempuan

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Pengangguran Terbuka, dan Kategori Pekerja tidak Penuh. <i>Population Is Years 15 of Age and Over by Educational Attainment. Unemployment, and Category Less than Normal Working Hourse.</i> (Februari/February 2019)					
Perkotaan+Pedesaan/Urban+Rural			Perempuan/Female		
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan <i>Educational Attainment</i>	Pengangguran Terbuka <i>Unemployment</i>	Pekerja Tidak Penuh/ <i>Less than Normal Working Hourse</i>			Setengah Penganggur <i>Unemployment + Underemployment</i>
		Setengah Penganggur <i>Underemployment</i>	Paruh Waktu <i>Part-time Worker</i>	Jumlah Total	
0	12.001	124.596	1.091.341	1.215.937	136.597
1	135.253	549.590	3.217.470	3.767.060	684.843
2	301.838	967.965	4.793.828	5.761.793	1.269.803
3	358.007	621.988	2.877.323	3.499.311	979.995
4	722.160	625.625	2.136.238	2.761.863	1.347.785
5	428.251	294.992	900.162	1.195.154	723.243
6	160.231	89.761	379.107	468.868	249.992

7	439.433	375.691	1.376.484	1.752.175	815.124
Jumlah/Total	2.557.174	3.650.208	16.771.953	20.422.161	6.207.382
Catatan / Note :					
0	Tidak/Belum Pernah Sekolah/ <i>No Schooling</i>				
1	Tidak/Belum Tamat SD/ <i>Not Yet completed Primary School</i>				
2	Sekolah Dasar / <i>Primary School</i>				
3	Sekolah Menengah Pertama / <i>Junior High School</i>				
4	SMA (umum) / <i>Senior High School (General)</i>				
5	SMA (Kejuruan) / <i>Senior High School (Vocation)</i>				
6	Diploma I/II/III/Akademi / <i>Diploma/ 1/II/III/Academy</i>				
7	Universitas / <i>University</i>				

Sumber: BPS Februari 2019

Tabel 1.3

Pengangguran ditinjau dari kategori umur pada penduduk desa dan kota secara keseluruhan

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Pengangguran Terbuka, dan Kategori Pekerja tidak Penuh. <i>Population Is Years 15 of Age and Overby Educational Attainment. Unemployment, and Category Less than Normal Working Hourse.</i> (Februari/February 2019)						
Perkotaan+Pedesaan/Urban+Rural			Laki-laki+Perempuan/Male +Female			
Kelompok Umur / <i>Age Group</i>	Pengangguran Terbuka <i>Unemployment</i>	Pekerja Tidak Penuh/Less than Normal Working Hourse			Jumlah Total	Setengah Penganggur <i>Unemployment + Underemployment</i>
		Setengah Penganggur <i>Underemployment</i>	Paruh Waktu <i>Part-time Worker</i>			
15-19	1.046.977	724.446	1.851.012	2.575.458	1.771.423	
20-24	2.266.197	1.658.122	1.890.067	3.548.189	3.924.314	
25-29	1.240.411	1.380.669	2.420.897	3.801.566	2.621.080	
30-34	583.911	1.124.579	2.797.383	3.921.962	1.708.490	
35-39	424.892	1.119.185	2.988.504	4.107.689	1.544.077	
40-44	332.709	1.061.304	3.074.822	4.136.126	1.394.013	
45-49	321.508	863.810	3.040.960	3.904.770	1.185.318	
50-54	207.542	643.118	2.887.224	3.530.342	850.660	
55-59	157.823	512.712	2.744.928	3.257.640	670.535	
60+	234.875	442.090	5.638.768	6.080.858	676.965	

Jumlah/Total	6.816.840	9.530.035	29.334.565	38.864. 600	16.346.875
--------------	-----------	-----------	------------	----------------	------------

Dari data pengangguran tersebut ditemukan angka yang masih sangat besar dan sangat membutuhkan strategi dalam pengentasan pengangguran. Chaves (2016) dalam penelitiannya menyebutkan ada empat pendorong utama terjadinya pengangguran atau ketimpangan yang terjadi di Indonesia yang mempengaruhi hidup generasi masa kini maupun masa depan, yakni :

1. Ketimpangan peluang : anak miskin seringkali tidak memiliki kesempatan awal yang adil dalam hidup, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk sukses dimasa depan.

2. Pekerjaan yang tidak merata : pasar tenaga kerja terbagi menjadi pekerja berketerampilan tinggi yang upahnya semakin meningkat, disisi lain terdapat pekerja yang tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan yang mana mereka mendapatkan produktivitas rendah serta ber upah rendah pula.

3. Tingginya Konsentrasi kekayaan : tidak sedikit warga Indonesia yang mengambil keuntungan lewat kepemilikan aset keuangan, atau cara-cara lain sekalipun itu korupsi, sehingga hal ini mendorong ketimpangan terjadi lebih tinggi.

4. Ketahanan Ekonomi Rendah : Guncangan ekonomi yang terjadi beberapa waktu ini mempengaruhi rumah tangga miskin sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan derajat ekonomi mereka.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu strategi yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Bukan hanya dari pemerintah, tetapi dapat juga berasal dari masyarakat atau bahkan sinergitas dan *ta'awun* berbagai macam pihak. Menurut Munir (2006) bahwa masyarakat yang berkualitas adalah masyarakat yang tidak diukur dari segi kuantitasnya, tetapi yang dapat membantu meningkatkan pendapatan nasional melalui pendayagunaan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, dibutuhkan kepedulian dari masyarakat untuk turut membantu pemerintah dalam

mengatasi pengangguran tersebut. Selain membantu pemerintah, sikap tersebut merupakan perbuatan mulia yang dilakukan sebagai rasa tolong menolong antar sesama, agar semua dapat memiliki kesempatan untuk bekerja. Tidak hanya kesempatan, namun juga kemampuan untuk memiliki pekerjaan. Salah satu lembaga non pemerintah yang berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat adalah pondok pesantren. Pondok pesantren yang selanjutnya disebut sebagai pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, dan mengamalkan ajaran islam dengan penekanan dasar keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari dalam melakukan interaksi sosial (Penelitian Nurhadi, 2018). Choeiriyah (2009) juga menjelaskan bahwa pesantren memiliki peran mendukung pembangunan melalui pemecahan permasalahan kehidupan. Oleh karena itu Lembaga ini tidak hanya menjadikan santri sebagai generasi intelektual, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat membantu perbaikan moral dan sosial masyarakat.

Dalam Tempo.co (2019) Bambang Brodjonegoro mengatakan semua berhak berkontribusi dalam pencapaian SDGs dan pesantren merupakan salah satu pelaku pembangunan yang dapat menunjang suksesnya SDGs (sustainable Development Goals) ia menuturkan pesantren memiliki peranan penting dalam pembangunan sumber daya manusia melalui pembangunan ekonomi umat dan jika hal ini dioptimalkan maka akan terwujud kemandirian pesantren yang menunjang kesejahteraan masyarakat. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Airlangga Hartanto dalam Kemenperin (2017) juga mengatakan bahwa pemerintah sedang menggenjarkan program *santripreneur* di pondok pesantren sebagai upaya penyediaan lapangan pekerjaan di daerah sekaligus mengurangi tingkat pengangguran. Tidak hanya itu pondok pesantren akan menjadi wadah dalam penyerapan tenaga kerja melalui pengembangan IKM dan hal ini secara tidak langsung akan dapat mendorong kesejahteraan

masyarakat daerah mengingat letak pesantren yang tersebar di hampir seluruh daerah di Indonesia

Jumlah pondok pesantren saat ini mencapai 25.938. Jumlah tersebut terbilang sangat besar. Oleh sebab itu pemerintah mendukung eksistensi pesantren yang disahkan dalam UU no 18 tahun 2019 tentang pesantren. Pemerintah sangat percaya bahwa pesantren mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan karena letak dan peran pesantren yang sangat strategis di masyarakat setempat khususnya peluang usaha di bidang *agricultural*, dalam Tempo.co (2019) pada SDGs Annual Confrence 2019 di Jakarta Bambang Brodjonegoro selaku kepala BAPPENAS pada masa itu, menyebutkan bahwa pesantren merupakan salah satu pelaku pembangunan yang berkontribusi terhadap target-target SDGs dan memiliki potensi besar dalam menciptakan wirausaha baru dan sektor industri kecil serta menengah yang dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Namun, tak banyak pesantren yang mampu memanfaatkan kesempatan tersebut. Masih banyak pesantren yang fokus pada pembangunan karakter keagamaan pada sumber daya manusia saja dan belum memaksimalkan pembangunan dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan umat. Hal tersebut sangat disayangkan sebab sebagai dunia pendidikan terkemuka di Indonesia, seharusnya pesantren mampu menjadi penunjang keberhasilan dan kesejahteraan umat di berbagai macam sektor kehidupan.

Islam mengajarkan manusia untuk selalu berusaha dengan cara yang baik demi menggapai kehidupan yang lebih baik dan menggapai ridho Allah SWT. Karena Allah tidak akan merubah kehidupan suatu kaum selain kaum tersebut merubahnya sendiri. Seperti dalam ayat berikut :

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

(11)

Lahu mu' aqqibatun min baini yadaihi wa min khalfihi yahfadzunahu min amrillah, innallaha laa yughoyyiru maa biqaumin hatta yughoyyiru maa bianfusihim, wa idza aradallahu biqaumin suu'an falaa maradda lah, wa maa lahum min duunihi min wal.

Arti : Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak akan ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar-Ra'd :11).

Namun tak dipungkiri bahwa terdapat beberapa pesantren yang sudah berbenah dan terlibat dalam SDGs guna menyongsong Indonesia emas. Salah satunya adalah Pesantren Mukmin Mandiri, yang merupakan pesantren dengan usia muda namun berani memunculkan pemberdayaan ekonomi dengan mengkonsep perpaduan potensi desa dan kota yang dapat memberikan sumbangsih terhadap pembangunan ekonomi umat yakni penanggulangan pengangguran. Hal ini merupakan usaha pesantren agar dapat berperan membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan dapat menjadi motivasi bagi pesantren lain utamanya yang berada di pedesaan agar beranjak melaksanakan pemberdayaan ekonomi pesantren dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pesantren guna membantu suksesnya pembangunan ekonomi. Sebelumnya telah ada penelitian dengan objek sejenis, yakni Pesantren Mukmin Mandiri oleh Fadhilah (2018) namun dalam penelitiannya hanya membahas mengenai bagaimana pesantren mampu mandiri dalam pemberdayaan ekonomi pesantrennya. Dan penelitian Mansur (2020) yang membahas mengenai Pesantren Mukmin Mandiri, namun dalam penelitiannya membahas mengenai peran pesantren terhadap kesejahteraan dalam penerapan maqashid syariah.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana peran pesantren Mukmin Mandiri dalam mengatasi pengangguran melalui pemberdayaan santri? dengan judul **“PERAN PESANTREN MUKMIN MANDIRI DALAM MENGATASI PENGANGGURAN MELALUI PEMBERDAYAAN SANTRI”**. Hasil penelitian ini diharapkan menginspirasi pesantren lain di Indonesia, agar berani melakukan strategi dan alternatif dalam mengatasi pengangguran melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat serta sebagai rujukan pemerintah bahwa pengentasan kemiskinan dan pengangguran juga dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan yakni pesantren.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, kesenjangan pada penelitian yakni belum pernah menemukan penelitian sebelumnya yang membahas sumbangsih pesantren Mukmin Mandiri dalam mengatasi pengangguran. Oleh karena itu peneliti mengangkat hal tersebut dalam penelitian ini.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran pesantren Mukmin Mandiri dalam mengatasi pengangguran, yang mengacu pada beberapa teori pengentasan pengangguran.

1.4 Ringkasan Hasil

Hasil penelitian ini yakni menjelaskan peran pesantren Mukmin Mandiri dalam mengatasi pengangguran bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau kurang mendapat kesempatan bekerja utamanya generasi muda yang kurang mendapat kesempatan, dan bagi mereka yang minim kemampuan melalui program usaha pesantren dalam bidang ekonomi dan sosial. Mereka dididik menjadi sumberdaya yang unggul dengan menjadi santri skaligus *preneur*. Tidak hanya itu, pesantren Mukmin Mandiri juga sebagai tempat dimana para masyarakat dalam kategori menganggur dapat

lebih memproduktivitaskan waktunya dengan turut mengkaji ilmu agama serta belajar berwirausaha.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang penelitian yang menjadi landasan pemikiran secara umum, baik berupa teori maupun fakta, sehingga penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan hasil, dan sistematika penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 menjelaskan tentang landasan teori yaitu konsep dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, yang dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah penelitian hingga kemudian dapat dijadikan proporsi penelitian. Selain itu juga, penelitian terdahulu yang terdapat didalamnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang dilakukan.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Didalamnya terdapat pendekatan penelitian, unit analisis, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, teknik validasi data, dan teknik analisis data.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek dan subjek penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai simpulan yang didapat dari penelitian yang ditujukan untuk membahas rumusan masalah yang telah diajukan dan

dijawab berdasarkan hasil penelitian serta berisi saran terkait pihak yang terkait dalam penelitian ini.